

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Bappeda merupakan implementasi Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana kerja yang selanjutnya disebut Renja SKPD yang penyusunannya mengacu dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat serta untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbanda) Tahun 2017 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berangkat dari ketentuan-ketentuan yang ada, Bappelitbanda Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu lembaga teknis instansi Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dituntut untuk mempunyai rencana kerja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Renja Bappelitbangda) Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 223 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga;
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 90 Tahun 2008 tentang Penjabaran Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015.
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah untuk memberikan panduan dalam melakukan perencanaan pembangunan sehingga sesuai dengan arah kebijakan yang telah digariskan dengan melihat prioritas kegiatan dan kemampuan anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja SKPD Tahun 2017 adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- D. Review Rancangan awal RKPDP
- E. Usulan Program / Kegiatan Masyarakat

BAB III.TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- C. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra BAPPEDA

Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

2.1.1. Kinerja Sasaran

Hingga akhir tahun 2015, BAPPEDA telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

- 1) Tujuan : Mewujudkan penataan ruang yang berkualitas dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pendayadunaan lahan dan ruang serta mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
a. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten dan kecamatan beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital;	1 perda	1 perda	100 %
b. Terlaksananya penjarangan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang	2 kali	2 kali	100 %
c. Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	Semua terlayani	Semua terlayani	100 %
d. Terlaksananya evaluasi terhadap implementasi dokumen rencana tata ruang	1 dokumen	1 dokumen	100 %

- 2) Tujuan : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA) sesuai ketentuan perundangan secara tepat waktu	3 dokumen	3 dokumen	100 %
b. Adanya partisipasi publik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (forum konsultasi publik, musrenbangcam, forum SKPD, musrenbangkab)	20 kegiatan	20 kegiatan	100 %

c. Dokumen perencanaan pembangunan tingkat SKPD (RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA-SKPD) sesuai ketentuan perundangan secara tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	100 %
d. Adanya kesesuaian program dengan prioritas Nasional/Provinsi	sesuai	sesuai	100 %

3) Tujuan : Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
a. Persentase kegiatan yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	87 %	87 %
b. Rata-rata tingkat pencapaian target kinerja program pembangunan,	100 %	89 %	89 %
c. Rata-rata tingkat pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan.	100 %	95 %	95 %

4) Tujuan : Meningkatkan ketersediaan data, informasi, dan referensi empiris bagi perencanaan pembangunan daerah”

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
a.Tesedianya data dan informasi pembangunan daerah : Tersedianya Kabupaten Dalam Angka, Tersedianya data PDRB, Tersedianya profil daerah, Tersedian data NTP dan Tersedianya data IKM	5 unit	4 unit	80 %
b. Tersedianya referensi empiris bagi perencanaan pembangunan daerah (hasil penelitian, hasil kajian)	4 unit	4 unit	100 %

5) Meningkatkan kapaitas dan kualitas kelembagaan perencanaan pembangunan”

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
a.Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai	100 %	100 %	100 %
b.Terlaksananya koordinasi, komunikasi, dan interelasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur dan menunjang pelaksanaan fungsi kelembagaan Bappeda	12 bulan	12 bulan	100 %
c. Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas aparatur perencana (diklat, workshop, seminar dsb)	18 kali	18 kali	100 %

A. KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program Program Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah.

Program penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah terdiri dari 5 kegiatan antara lain :

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah

- a) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya rapat-rapat koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Purbalingga dalam mendukung kegiatan perencanaan tata ruang serta pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- b) Hasil kegiatan adalah diterbitkannya 63 surat rekomendasi tata ruang oleh BKPRD Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari 44 surat rekomendasi sesuai dengan tata ruang dan 13 surat rekomendasi tidak sesuai serta 6 jawaban tentang informasi tata ruang.
- c) Sasarannya adalah terlayannya masyarakat dalam mendapatkan informasi tata ruang dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031.
- d) Anggaran sebesar Rp. 67.821.000,- realisasi Rp. 50.400.500,- (74,31 %).
- e) Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
- f) Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
- g) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.

2. Analisis Interpretasi Peta GPS Geodetik.

- a) Maksud dari kegiatan Realisasi Analisis Interpretasi Peta GPS Geodetik yaitu untuk dasar dalam pemetaan RDTR Perkotaan Purbalingga
- b) Hasil kegiatan adalah tidak dilaksanakan
- c) Sasarannya adalah -
- d) Anggaran sebesar Rp. 89.297.000,- realisasi Rp. 0,- (0 %).
- e) Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
- f) Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
- g) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud
- h) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan : kegiatan ini tidak dilaksanakan karena pada tahun 2016 RTRW akan direview sehingga RDTR akan menyesuaikan perubahan RTRW. Apabila kegiatan ini dipaksakan dilaksanakan pada tahun 2015 maka menjadi kurang bermanfaat dan harus dilaksanakan lagi setelah Review RTRW selesai..

3. Pencetakan Peta Kabupaten Purbalingga

- a) Maksud dari kegiatan Pencetakan Peta adalah terwujudnya penataan ruang yang berkualitas dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pendayagunaan lahan dan ruang serta mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Tujuan pekerjaan ini adalah :

- Mencukupi kebutuhan data spasial untuk pengambilan keputusan di bidang penataan ruang dan penggunaan lahan di Kabupaten Purbalingga;
 - Mencukupi kebutuhan data spasial untuk aksi mitigasi bencana di Kabupaten Purbalingga;
- b) Hasil kegiatan adalah Tersedianya 200 peta (peta administrasi, rawan bencana, dan pola ruang) di Kabupaten purbalingga sesuai dengan Perda no. 5 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Purbalingga dan Tersedianya 200 atlas Kabupaten purbalingga sesuai dengan Perda no. 5 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Purbalingga;
- c) Sasaran dari Kegiatan Pencetakan Peta adalah seluruh SKPD yang terkait dengan penataan ruang dan penggunaan lahan, mitigasi bencana, serta stakeholder lainnya.
- d) Anggaran sebesar Rp 50.000.000,- realisasi Rp 45.783.000,- (91,57%)
- e) Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
- f) Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai rencana kerja
- g) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud baik.
- h) Hal-hal yang perlu dilaporkan tidak ada.
4. Identifikasi dan Analisis Potensi Lokasi Industri.
- a) Maksud dari kegiatan Penyusunan studi ini adalah guna mengetahui capaian pengembangan kawasan industri / peruntukan industri serta mengetahui kecenderungan arah perkembangan industri yang ada.
- b) Hasil kegiatan adalah Kegiatan Identifikasi Dan Analisis Potensi Lokasi Industri sebagai berikut :
- Tersedianya dokumen dan Analisis Potensi Lokasi Industri sesuai dokumen tata ruang, sebagai dokumen penunjang ketataruangan yang berkesinambungan.
 - Tersedianya dokumen penunjang Review RTRW Kab. Purbalingga Tahun 2011-2030.
- c) Sasaran dari penyusunan studi ini adalah data pola perkembangan kawasan/peruntukan industri baik besar, menengah dan kecil, serta analisa pemanfaatan kawasan peruntukkan industri dan menemukan potensi lokasi kawasan peruntukan industri yang sesuai kaidah tata ruang yang berkelanjutan.
- d) Anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- realisasi Rp. 147.682.500,- (98,46%).

- e) Permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya ketersediaan data pendukung baik primer maupun sekunder serta data-data berkaitan dengan kecenderungan arah pergerakan industri dari tahun ketahun (time series) hingga tahun rencana.
- f) Solusi yang ditempuh adalah
 - Meningkatkan dan mengoptimalkan koordinasi dan konsultasi ke SKPD terkait baik tingkat pusat, provinsi, pelaku usaha dan masyarakat, guna mendapatkan data penunjang seakurat mungkin.
 - Mengoptimalkan metoda, analisis dan penilaian teknis akademis secara maksimal, akurat dan uptodate/terbarukan.
- g) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud baik.
- h) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.

5. Fasilitasi Eco Distrik Perkotaan Purbalingga

- a) Maksud dari kegiatan Fasilitasi Eco Distrik Perkotaan Purbalingga adalah untuk menyediakan Green Planning Desain di perkotaan agar terwujud kota hijau yang berkelanjutan
- b) Hasil kegiatan adalah Tersedianya dokumen green planning desain di perkotaan
- c) Sasaran dari Kegiatan Fasilitasi Eco Distrik Perkotaan Purbalingga adalah terwujudnya kota modern yang berwawasan lingkungan.
- d) Anggaran sebesar Rp 155.800.000,- realisasi Rp 143.830.686,- (98,32%)
- e) Permasalahan yang dihadapi tidak ada.
- f) Solusi yang ditempuh adalah dilakukan sesuai dengan rencana kerja.
- g) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud baik.
- h) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada

B. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 10 kegiatan antara lain:

1. Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2015

- a) Maksud dari kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2015 adalah mewujudkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan mendapatkan masukan rancangan awal RKPD tahun 2015.
- b) Hasil kegiatan terlaksananya diskusi pembangunan yang dihadiri 324 peserta dari komisi-komisi DPRD, para staf ahli bupati, para asisten sekda, dan para kepala SKPD, para camat, kasi ekbang dan delegasi kecamatan, perguruan

tinggi, instansi vertikal, perbankan, bumd, tp pkk kabupaten purbalingga, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, asosiasi usaha dan LSM, paguyuban kepala desa (wirapraja) dan forum komunikasi perangkat desa (FK persada), pemangku kepentingan lainnya. Terlaksananya 4 forum diskusi kelompok yaitu bidang pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial, bidang ekonomi, bidang lingkungan hidup dan infrastruktur wilayah, bidang pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Terserapkannya aspirasi masyarakat sebanyak 1102 usulan kegiatan atau sebesar Rp. 482.414.386.168,-

- c) Sasaran kegiatan sasaran kegiatan adalah terselenggaranya forum konsultasi publik yang transparan, demokratis dan akuntabel.
- d) Anggaran jumlah anggaran Rp. 51.219.000. Realisasi Rp. 49.675.500,- (96,80 %).
- e) Permasalahan : masih rendahnya usulan untuk kegiatan peningkatan sumberdaya manusia sebesar 12 % (pendidikan dan kesehatan) dan masih didominasi oleh usulan infrastruktur yakni sebesar 55,5 %.
- f) Solusi : sosialisasi pentingnya pembangunan kesehatan dan pendidikan dilingkungan masyarakat.
- g) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2015 dalam keadaan baik.
- h) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.

2. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & PPAS Tahun 2016

- a) Maksud dari kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & PPAS Tahun 2016 adalah
 - (1) Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2016;
 - (2) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - (3) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - (4) Menjalin komunikasi yang berkualitas dan berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif khususnya dalam rangka penyusunan APBD
- b) Hasil kegiatan adalah tersusunya 75 buku KUA Tahun 2014, 75 buku PPAS Tahun 2016.
- c) Sasarannya adalah Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan Menjalin

komunikasi yang berkualitas dan berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif khususnya dalam rangka penyusunan APBD

- d) Anggaran sebesar Rp.75.000.000,- realisasi Rp. 60.705.000,- (91,63%)
 - e) Permasalahan terbitnya undang-undang baru tentang pemerintahan daerah utamanya yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran.
 - f) Solusi konsultasi ke pemerintah pusat dan provinsi.
 - g) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2015 dalam keadaan baik.
 - h) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
3. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & PPAS Perubahan Tahun 2015
- a) Maksud dari kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & PPAS Perubahan Tahun 2015 adalah
 - (1) Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Perubahan, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun 2015;
 - (2) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - (3) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - (4) Menjalin komunikasi yang berkualitas dan berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif khususnya dalam rangka penyusunan APBD Perubahan
 - b) Hasil kegiatan adalah tersusunya 75 buku KUA Perubahan Tahun 2015, 75 buku PPAS Perubahan Tahun 2015.
 - c) Sasarannya adalah Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan Menjalin komunikasi yang berkualitas dan berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif khususnya dalam rangka penyusunan APBD Perubahan
 - d) Anggaran sebesar Rp.65.000.000,- realisasi Rp. 58.484.860.000,- (89,98%)
 - e) Permasalahan terbitnya undang-undang baru tentang pemerintahan daerah utamanya yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran.
 - f) Solusi konsultasi ke pemerintah pusat dan provinsi.
 - g) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2015 dalam keadaan baik.
 - h) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
4. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
- a) Maksud dari kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah

- (1) Pedoman bagi SKPD Kabupaten Purbalingga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016;
 - (2) Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016;
 - (3) Pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016;
 - (4) Menciptakan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah, serta mewujudkan keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar urusan guna meningkatkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.
- b) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016.
 - c) Hasil kegiatan adalah tersusunnya 300 buku RKPD Musrenbangkab Tahun 2016, 40 buku rancangan teknokratis RKPD tahun 2016, 50 buku Rancangan Akhir RKPD Tahun 2016 dan 50 buku RKPD Tahun 2016.
 - d) Sasarannya : Terwujudnya dokumen perencanaan secara tertib dan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - e) Anggaran sebesar Rp.139.290.000,- realisasi Rp 119.589.874,- (77,91 %)
 - f) Permasalahan tidak ada.
 - g) Solusi tidak ada.
 - h) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2015 dalam keadaan baik.
 - i) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.

5. Penyusunan RKPD Perubahan

- a) Maksud dari kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan adalah
 - (1) Pedoman bagi SKPD Kabupaten Purbalingga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD Tahun 2015;
 - (2) Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2015;
 - (3) Pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2015;
 - (4) Menciptakan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah, serta mewujudkan keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar urusan

guna meningkatkan efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

- b) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2015.
 - c) Hasil kegiatan adalah tersusunnya, 50 buku Rancangan Akhir RKPD Perubahan Tahun 2015 dan 50 buku RKPD Perubahan Tahun 2015.
 - d) Sasarannya : Terwujudnya dokumen perencanaan secara tertib dan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - e) Anggaran sebesar Rp.79.991.000,- realisasi Rp 67.748.818,- (84,7 %)
 - f) Permasalahan tidak ada.
 - g) Solusi tidak ada.
 - h) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2015 dalam keadaan baik.
 - i) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
6. Fasilitas SIM Perencanaan.
- a) Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu tersedianya data hasil perencanaan mulai dari hasil musrenbangcam sampai dengan rancangan RKPD dan pelatihan Implementasi bagi SKPD dan Kecamatan.
 - b) Hasil kegiatan adalah tersedianya SIM pada Penyusunan Dokumen Perencanaan
 - c) Sasarannya yaitu Terwujudnya perencanaan partisipatif yang akuntabel
 - d) Anggaran sebesar Rp.69.754.000,- realisasi Rp. 65.800.950,- (94,33 %)
 - e) Permasalahan yang dihadapi yaitu Keluarnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sehingga SIM harus diperbaiki dan pelatihan penyegaran untuk operasionalisasi Musrenbang 2016 tidak dapat dilaksanakan sampai dengan selesainya upgrade SIM Perencanaan. Kendala teknis berupa seringnya server dan jaringan terkena petir sehingga harus terhenti implementasinya.
 - f) Solusi yang ditempuh adalah perbaikan SIM Perencanaan pada tahun 2016 dan penyegaran operasionalisasi pada tahun 2016.
 - g) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2015 dalam keadaan cukup baik.
 - h) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
7. Penyusunan Pedoman Tatakelola Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Umum Pembangunan Tahunan Daerah

- a) Maksud Penyusunan Pedoman Tatakelola Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Umum Pembangunan Tahunan Daerah adalah memberikan arahan dalam tataran teknokratik atas pelaksanaan Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Musrenbangkab serta dalam penyusunan Renja SKPD.
 - b) Hasil kegiatan adalah (1) Surat Edaran Bupati tentang petunjuk teknis perencanaan pembangunan tahun 2015 untuk penyusunan RKPD tahun 2016. (2) Rancangan Surat Edaran Bupati tentang petunjuk teknis perencanaan pembangunan tahun 2016 untuk penyusunan RKPD tahun 2017
 - c) Sasarannya yaitu Terwujudnya sinergitas pembangunan anatar desa dengan kabupaten dan ataraa sektor dan urusan pemerintahan;
 - d) Anggaran sebesar Rp.25.000.000,- realisasi Rp. 18.135.850,- (72,54 %)
 - e) Perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan dimaksud melalui dan termuat dalam Rencana Kerja (Renja) dan RKA SKPD.
 - f) Permasalahan yang dihadapi belum tersusunnya RPJMD 2016-2021.
 - g) Solusi yang ditempuh tidak ada.
 - h) Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tahun 2015 dalam keadaan baik.
 - i) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada.
8. Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahn 2015-2020
- a) Maksud Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahn 2015-2020 untuk menjadi pedoman dalam pelaskanaan pembangunan selama lima tahun dan merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - b) Hasil kegiatan : tersedianya Draft Rancangan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 2020.
 - c) Sasaran, kelompok sasaran kegiatan adalah aparatur Pemda dan SKPD.
 - d) Anggaran : Rp. 153.500.00,-dan Realisasi : Rp. 119.589.874,- (77,91%)
 - e) Permasalahan yang dihadapi : -
 - f) Solusi : kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja.
 - g) Kondisi sarana prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dalam kondisi baik.
 - h) Hal yang perlu dilaporkan : -
9. Penyusunan Roadmap Pengembangan Gula Kelapa Organik
- a) Maksud dari kegiatan ini adalah tersedianya roadmap pengembangan gula kelapa organik yang terdiri dari peta potensi serta strategi pengembangan gula kelapa organik di Kabupaten Purbalingga. Roadmap pengembangan gula kelapa organik di Kabupaten Purbalingga menjadi pedoman/ acuan dalam

pelaksanaan program bagi seluruh stake holder pengembangan gula kelapa organik di Kabupaten Purbalingga secara terpadu dan holistik sehingga program dapat lebih efisien dan efektif.

- b) Hasil Kegiatan adalah (1) Tersedianya Identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengembangan gula kelapa organik di Kabupaten Purbalingga; (2) Tersedianya analisa potensi, permasalahan/ hambatan, dan peluang pengembangan gula kelapa organik di Kabupaten Purbalingga; (3) Tersedianya roadmap pengembangan gula kelapa organik di Kabupaten Purbalingga; (4) Laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir dalam bentuk hard copy dan soft copy.
- c) Sasaran dari kegiatan ini adalah tersedianya roadmap pengembangan gula kelapa organik di Kabupaten Purbalingga, yang berisikan : (1) Identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengembangan gula kelapa organik di Kabupaten Purbalingga; (2) Analisa potensi, permasalahan/ hambatan, dan peluang pengembangan gula kelapa organik di Kabupaten Purbalingga; (3) Roadmap pengembangan gula kelapa organik di Kabupaten Purbalingga.
- d) Anggaran : Rp. 51.000.000,- dan Realisasi : Rp. 50.915.425,- (99,83%) .
- e) Permasalahan yang Dihadapi : (1) Waktu yang terlalu sempit 3 (tiga) bulan untuk menginventarisir data-data primer dan sekunder serta melakukan wawancara mendalam, diskusi (FGD) di setiap sentra gula kelapa dan workshop; (2) Terbatasnya sumber data di masing-masing SKPD terkait.
- f) Upaya Pemecahan Masalah : (1) Persiapan tim teknis dan pihak ketiga yang ditunjuk supaya lebih maksimal lagi; (2) Peran data dukung SKPD terkait.

10. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

- a) Maksud dari kegiatan ini adalah guna mengkaji RPJMD agar perencanaan yang dihasilkan serasi dengan lingkungan hidup sehingga dapat berkelanjutan. Dalam perencanaan pembangunan diperlukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai pedoman dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- b) Hasil Kegiatan adalah terlatihnya SDM aparatur perencana SKPD dalam penyusunan KLHS.
- c) Sasaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD
- d) Anggaran : Rp. 60.256.000,- dan Realisasi : Rp. 22.536.278,- (37,40%)
- e) Permasalahan yang Dihadapi : perubahan jadwal pilkada yang mempenaruhi tahapan penyusunan KLHS. sehingga merubah output kegiatan.

- f) Upaya Pemecahan Masalah : merubah out put kegiatan menjadi terlatihnya SDM aparatur perencana SKPD dalam penyusunan KLHS dan melanjutkan kembali pada tahun 2016 sesuai tahapan.

C. Program Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 17 kegiatan meliputi:

1. Pelaporan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- a) Maksud dari kegiatan ini adalah melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah agar terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.
- b) Hasil kegiatan :
 - (1) Tersusunnya pelaporan Kegiatan TP, DAK, dan Bangub secara berkala per triwulan;
 - (2) Tersusunnya Buku Evaluasi RPJMD;
 - (3) Tersusunnya Laporan Pengendalian Pelaksanaan RKPD 2015 per triwulan.
- c) Sasaran, kelompok sasaran kegiatan adalah semua SKPD, semua dinas, instansi, kantor, yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purbalingga.
- d) Anggaran : Rp. 138.100.000,- dan Realisasi : Rp. 126.708.250,- (91,75%).
- e) Perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan ini sudah melalui dan termuat dalam RKPD Tahun 2015, Renja BAPPEDA Tahun 2015 dan RKA BAPPEDA Tahun 2015.
- f) Permasalahan yang dihadapi : kurang memadainya sumber data yang dimiliki oleh SKPD dan masih terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM dalam pengisian form laporan.
- g) Solusi : melaksanakan desk verifikasi seluruh SKPD.
- h) Kondisi sarana prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dalam kondisi baik.
- i) Hal yang perlu dilaporkan : untuk meningkatkan keterisian form laporan dan kevalidan data perlu dukungan anggaran untuk SKPD.

2. FEDEP

- a) Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terfasilitasinya berbagai kegiatan pengembangan perekonomian daerah dan peningkatan lapangan kerja dan kesempatan berusaha di daerah. Sedangkan tujuannya adalah terwujudnya komunikasi antara pelaku ekonomi lokal dengan Pemerintah Kabupaten

Purbalingga, diseminasi informasi dan teknologi tepat guna, promosi dan pengembangan produk lokal sebagai salah satu kontributor kinerja perekonomian daerah.

- b) Sasaran Fasilitasi Kegiatan FEDEP (Forum for Economic Development and Employment Promotion) Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 adalah memberikan dukungan kepada Paguyuban sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat pelaku ekonomi daerah dalam mendukung kegiatan FPESD (Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya) Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini juga melaksanakan pengiriman UMKM dalam berbagai pelatihan dan Gelar Produk Unggulan. Manfaat yang dapat dihasilkan dari Kegiatan FEDEP adalah :

- (1) Terwujudnya sinergitas antar SKPD Kabupaten Purbalingga dan dengan pelaku usaha dalam upaya-upaya mendorong perkembangan perekonomian daerah.
- (2) Meningkatnya peran serta masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- (3) Terwujudnya sinergitas antara program-program pengembangan ekonomi lokal pada Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Terselenggaranya pembinaan kelembagaan dan pelatihan-pelatihan bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
- (5) Semakin dikenalnya produk unggulan Kabupaten Purbalingga oleh masyarakat di luar Kabupaten Purbalingga.

- c) Output / Keluaran Fasilitasi kegiatan FEDEP digunakan untuk koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh FPESD Provinsi Jawa Tengah seperti lokakarya, pelatihan dan pameran serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh FEDEP Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Workshop Jamur Pangan

Pelatihan dilaksanakan bekerjasama dengan Universitas Jenderal Soedirman dan Paguyuban Jamur Purbalingga diikuti oleh 30 peserta terdiri dari Petani Jamur di seluruh Kabupaten Purbalingga pada tanggal 20 April 2015.

- (2) FGD Ekonomi Kerakyatan

FGD Ekonomi Kerakyatan diikuti oleh seluruh klaster, kelompok dan Paguyuban kegiatan ekonomi lokal di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 12 – 16 Januari yang dimaksudkan untuk menggali permasalahan dan isu-isu pengembangan ekonomi lokal.

- (3) FGD Pariwisata

FGD Pariwisata dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2015 dengan peserta dari Desa Wisata di seluruh Kabupaten Purbalingga, Wisbangga (Paguyuban Pariwisata Purbalingga) dan Dinbudparpora.

(4) Gelar Produk Unggulan Klaster UMKM Jawa Tengah 2015

Gelar Produk Unggulan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 dilaksanakan di Atrium Paragon Mall pada tanggal 23 – 27 September 2015.

(5) Workshop/ Lokakarya/ Rakor

Beberapa workshop/ lokakarya yang dilaksanakan oleh FPESD Provinsi Jawa Tengah dan diikuti oleh FEDEP Kabupaten Purbalingga.

(6) Workshop Sertifikasi Halal

Workshop Sertifikasi Halal dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2015 bekerja sama dengan MUI Provinsi Jawa Tengah dengan peserta berasal dari pengrajin makanan di Kabupaten Purbalingga.

(7) Sosialisasi Produk Unggulan

FEDEP Kabupaten Purbalingga bekerjasama dengan DINPERINDAGKOP Kabupaten Purbalingga mengadakan rapat sosialisasi produk unggulan Kabupaten Purbalingga pada tanggal 4 November 2015 dengan peserta dari klaster Kerajinan Sapu.

(8) FGD Roadmap Pengembangan Gula Kelapa Organik

Dengan tujuan menampung saran dan berdiskusi diantara seluruh stakeholder pengembangan gula kelapa organik, FEDEP Kabupaten Purbalingga bekerja sama dengan LPPSLH melaksanakan FGD pengembangan Gula Kelapa Organik pada tanggal 5 November dengan peserta dari DINPERINDAGKOP, DINTANBUNHUT, BPPKP, penderes, pengrajin dan pengepul gula Kabupaten Purbalingga.

(9) Cross Learning Kemasan

Salah satu kelemahan produk UMKM Kabupaten Purbalingga adalah kemasan, sehingga dirasa perlu untuk membuka wawasan dan pengetahuan tentang kemasan yang baik dan efisien ke Mojokerto pada tanggal 9 – 11 November 2015 dengan mengajak DINPERINDAGKOP, BDS, Perwakilan Klaster dan BAPPEDA.

(10) Rapat Pengembangan kerajinan Tusuk Sate

Rapat dilaksanakan pada tanggal 21 Desember dengan bekerja sama dengan DINPERINDAGKOP Kabupaten Purbalingga dengan peserta seluruh pengrajin tusuk sate Kabupaten Purbalingga.

(11) Rapat Koordinasi FEDEP Kabupaten Purbalingga tahun 2015

Untuk sosialisasi Restrukturisasi FEDEP Kabupaten Purbalingga dan diskusi pengembangan ekonomi lokal, FEDEP Kabupaten Purbalingga mengadakan Rakor FEDEP Kabupaten Purbalingga pada tanggal 29 dan 31 Desember 2015.

- d) Anggaran : Rp. 99.984.000,- dan Realisasi : Rp. 78.655.228,- (79%) Satu kegiatan FEDEP yang telah direncanakan dalam RKO Tahun 2015 namun tidak bisa dilaksanakan adalah Pelatihan Pupuk Organik.
- e) Permasalahan yang Dihadapi :
 - (1) Soliditas di beberapa klaster masih kurang sehingga sulit untuk mengumpulkan kekuatan dan berdiskusi dalam klaster tertentu;
 - (2) Kurangnya tenaga sekretariat FEDEP dan anggota FEDEP yang kurang aktif membuat kegiatan FEDEP yang sudah direncanakan dalam RKO FEDEP Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 terkendala untuk dilaksanakan.
- f) Upaya Pemecahan Masalah :
 - (1) Dibentuknya paguyuban-paguyuban adalah salah satu usaha untuk memperkuat kelembagaan dan hubungan anggota klaster dengan fasilitasi pertemuan rutin klaster oleh FEDEP.
 - (2) FEDEP Kabupaten Purbalingga telah melakukan restrukturisasi kepengurusan FEDEP Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2015 dan berencana membuat Sekretariat FEDEP beserta tenaga administrasinya di Tahun 2016.

3. Pendampingan Program WISMP

- a) Maksud dari kegiatan ini adalah Pendampingan Program Wismip dianggarkan sebagai syarat pendanaan Wismip dari pusat sesuai MOU antara Bupati Purbalingga dengan Kementrian Pekerjaan Umum
- b) Hasil Kegiatan adalah Terlaksananya pendampingan Program Wismip sebagai persyaratan pendanaan program Wismip dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- c) Sasaran dari kegiatan ini adalah Terserapnya hibah WISMP dari pemerintah pusat
- d) Anggaran : Rp. 79.000.000,- dan Realisasi : Rp. 57.313.750,- (27,45%)
- e) Permasalahan yang Dihadapi : -
- f) Upaya Pemecahan Masalah : -

4. Pendampingan Program Nasional Bidang Keciaptakaryaan

- a) Maksud dari kegiatan ini adalah salah satu upaya guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, maka perlu pendampingan untuk memfasilitasi sebagai penunjang

kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan Program Nasional Bidang Keciaptakaryaan

b) Hasil Kegiatan adalah

- (1) Terlaksananya kegiatan PAMSIMAS di wilayah Kabupaten Purbalingga.
- (2) Tersusunnya RPIJM Bidang Keciaptakaryaan

c) Terkendalnya suatu kegiatan yang menunjang perumahan, penyehatan lingkungan permukiman dan penyediaan air bersih dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

d) Sasaran dari kegiatan Pendampingan Program Nasional Bidang Keciaptakaryaan sebagai berikut :

- (1) Memfasilitasi dan mengkoordinir jalannya Kegiatan Program Nasional dibidang Keciaptakaryaan.
- (2) Memperlancar jalannya Kegiatan Program Nasional dibidang Keciaptakaryaan supaya berjalan dengan Ewektif dan Evisien.
- (3) Dapat terselenggaranya kegiatan dengan baik dan benar.
- (4) Terselenggaranya koordinasi pelaksana kegiatan yang menunjang perumahan, penyehatan lingkungan permukiman dan penyediaan air bersih di wilayah Kabupaten Purbalingga.
- (5) Tercapainya hasil yang maximal ewektif dan ewisien dari kegiatan yang menunjang perumahan, penyehatan lingkungan permukiman dan penyediaan air bersih di wilayah Kabupaten Purbalingga.

e) Anggaran : Rp. 69.631.000,- dan Realisasi : Rp. 45.809.150,- (65,79%)

f) Permasalahan yang Dihadapi : -

g) Upaya Pemecahan Masalah : -

5. Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata

a) Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah

Bahwa salah satu upaya guna akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga anatar lain dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi. Kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dan pendayagunaan potensi wilayah Kabupaten Purbalingga. Kerjasama ini antara lain bertujuan untuk :

- (1) Menerapkan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Darma Perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ;
- (2) Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan potensi wilayah Kabupaten Purbalingga ;
- (3) Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Bentuk kerjasama dalam hal penerapan dan peningkatan penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi bidang pengabdian kepada

masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), yang ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga sesuai dengan tema kegiatan antara lain KKN Tematik Posdaya, Posdaya Berbasis Masjid, Terpadu TMMD, Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (PPM), Vokasi, Kesehatan, dan KKN reguler.

b) Realisasi kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) digunakan untuk Penerimaan dan pelepasan / penyerahan kembali mahasiswa KKN dari 6 Perguruan Tinggi (UNSOED Purwokerto, UMP Purwokerto, IAIN Purwokerto, Akper YAKPERMAS Banyumas, UGM Yogyakarta, dan Ibaraki University, Jepang) di tahun 2015 dengan data sebagai berikut :

No	Universitas	Jumlah		Tematik
		Peserta	Desa/Kec	
1	UNSOED	470	47 / 4	POSDAYA
		20	1/1	Terpadu TMMD
2	YAKPERMAS	20	2 / 2	VOKASI
3	UMP	350	35 / 3	POSDAYA / VOKASI
4	IAIN PWT	250	25 / 2	POSDAYA BERBASIS MASJID
		360	25 / 2	POSDAYA BERBASIS MASJID
5	UGM	30	1/1	PPM
6	IBARAKI UNIVERSITY, JEPANG	11	1/1	PPM
		1.511	137 / 17	

c) Anggaran : Rp. 166.015.000,- dan Realisasi : Rp. 211.773.425,- (92,88%)

Realisasi bantuan barang guna fasilitasi pelaksanaan kegiatan KKN di Kabupaten Purbalingga :

(1) Periode I (Unsoed & Akper Yakpermas)	Rp 29.850.000,-
(2) Periode II (IAIN Purwokerto)	Rp 31.385.350,-
(3) Periode III (UMP, Unsoed, dan IAIN Pwt)	Rp 62.838.800,-
Jumlah	Rp 124.074.150,-

d) Permasalahan

- (1) Dalam beberapa kesempatan ditemukan bahwa program kerja mahasiswa KKN tidak melalui observasi langsung dimasyarakat, sehingga kurang aplikatif dan dan kurang tepat aplikasinya dimasyarakat.
- (2) Kurangnya adaptasi dalam masyarakat, personality mahasiswa yang kurang baik, dan ketidakaktifan mahasiswa juga masih ditemui sehingga berpengaruh pada optimalisasi program kerja ;
- (3) Adanya program kerja dalam SKPD yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa KKN akan tetapi belum dimanfaatkan karena kurangnya komunikasi dan koordinasi ;
- (4) Cukup pendeknya jangka waktu KKN sehingga program kerja yang dilaksanakan kurang optimal.

e) Solusi

- (1) Membekali mahasiswa dalam penguasaan wilayah dan pembekalan untuk memberikan resep praktis dalam pendekatan sosial sehingga melancarkan pelaksanaan program KKN ;
- (2) Optimalisasi, intensifikasi dan difersifikasi program kerja mahasiswa KKN disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat sehingga menjadikan KKN sebagai program penting bagi masyarakat ;
- (3) Mengingat data pada masing-masing indikator merupakan data teknis dan sektoral maka perlu adanya ketersediaan data yang lengkap guna perencanaan, evaluasi dan optimalisasi program ;
- (4) Optimalisasi koordinasi dengan SKPD terkait guna optimalisasi program kerja KKN di wilayah.

f) Hal-Hal lain yang perlu dilaporkan

- (1) Program KKN masih diperlukan guna mendukung pelaksanaan pembangunan desa di Kabupaten Purbalingga, melalui observasi langsung dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat teridentifikasi permasalahan riil dalam masyarakat di berbagai bidang digunakan sebagai bahan dalam merumuskan exit strategy guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Melalui kuisisioner dan interview guide yang diberikan kepada mahasiswa KKN dapat teridentifikasi dan terekam berbagai permasalahan riil yang ada di dalam masyarakat, sehingga memudahkan dalam mengevaluasi program pembangunan yang sudah ada dan menentukan desain program selanjutnya
- (3) Belanja barang yang didistribusikan dapat menjadi stimulan dan mendukung kelancaran program kerja KKN di desa diharapkan menjadi stimulan dalam menciptakan swadaya masyarakat.
- (4) Diperolehnya bantuan pemikiran, tenaga, dan ipteks dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan ;
- (5) Didapatnya pengalaman dalam mengolah serta menumbuhkan potensi swadaya masyarakat sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan ;
- (6) Terbentuknya kader-kader penerus di dalam masyarakat sehingga terjamin kelanjutan upaya pembangunan ;
- (7) Diperolehnya manfaat dari bantuan tenaga, pikiran dan gagasan mahasiswa dalam melaksanakan program dan proyek pembangunan yang berada dibawah tanggung jawabnya ;
- (8) Laporan – laporan hasil KKN dapat dijadikan sumber rujukan dalam merencanakan program pembangunan ;
- (9) Mahasiswa KKN diharapkan dapat menjadi katalisator pembangunan komunitas lokal.

g) Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Ban Gub)

a) Maksud dan tujuan kegiatan Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah

- (1) Penyelenggaran koordinasi dan konsolidasi Tim Koordinasi Pendidikan Penanggulangan Kemiskinan dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga.
- (2) Memperkuat dan mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purbalingga.
- (3) Merumuskan kesepakatan, kebijakan dan rekomendasi dalam upaya meningkatkan efektifitas program penanggulangan, pengurangan dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga dari berbagai instansi/SKPD/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha.

b) Sasaran Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan adalah seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Pemangku Kepentingan lainnya terkait upaya penanggulangan, pengurangan dan pengentasan kemiskinan.

c) Keluaran / Out Put

- (1) Laporan hasil kegiatan koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Purbalingga;
- (2) Hasil pelaksanaan berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga;
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

d) Target dan Realisasi Keuangan

Anggaran : Rp. 71.100.000,- dan Realisasi : Rp. 32.702.575,- (92,88%)

e) Permasalahan yang dihadapi :

Adapun permasalahan yang masih dihadapi antara lain :

- (1) Rekrutment 2 orang Tenaga Ahli Kemiskinan tidak terealisasi karena indeks honor belum sesuai dengan kompetensi/kualifikasi tenaga ahli yang akan direkrut serta SIM belum siap karena difasilitasi P3BM Bappenas/TNP2K.
- (2) Line Internet Jaringan Telepon masih terpakai di sekretariat BAPPEDA Purbalingga.
- (3) Beberapa rapat-rapat besar di biayai oleh Bagian Umum Setda, Provinsi dan Kegiatan lain.

f) Upaya pemecahan masalah :

- (1) Rekrutment 2 orang tenaga ahli kemiskinan dilaksanakan pada TA 2016 dengan menggunakan indeks baru yang telah disesuaikan
- (2) Koordinasi dengan P3BM Bappenas/TNP2K terkait SIM penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan.

6. Monitoring dan Evaluasi Bidang Energi, Sumberdaya Mineral, Lingkungan Hidup dan Prasarana Wilayah

a) Maksud dari kegiatan ini adalah

- (1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan bidang energi, sumberdaya mineral, lingkungan hidup dan prasarana wilayah, maka perlu dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan bidang energi, sumberdaya mineral, lingkungan hidup dan prasarana wilayah untuk mendapatkan output yang optimal. Tujuannya adalah untuk:
- (2) Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang energi, sumberdaya mineral, lingkungan hidup dan prasarana wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 yang antara lain meliputi ketepatan sasaran (obyek) dan lokasi kegiatan, efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumberdaya (input) serta pencapaian keluaran (output) kegiatan.

- (3) Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan yang meliputi hasil (outcome) dan manfaat (benefit) kegiatan tersebut.
 - (4) Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan/program pembangunan bidang energi, sumberdaya mineral, lingkungan hidup dan prasarana wilayah.
 - (5) Menyampaikan laporan secara berkala hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan akhir
- b) Hasil Kegiatan adalah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Bidang ESDM & Praswil pada 102 titik lokasi dan 6 kali rakor
- c) Sasaran dari kegiatan ini adalah
- (1) Terpantaunya pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang energi, sumberdaya mineral, lingkungan hidup dan prasarana wilayah Kabupaten Purbalingga tahun 2015 yang meliputi ketepatan sasaran (obyek) dan lokasi kegiatan, efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya (input) serta pencapaian keluaran (output) kegiatan;
 - (2) Terpantaunya pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang energi, sumberdaya mineral, lingkungan hidup dan prasarana wilayah Kabupaten Purbalingga tahun 2015 yang meliputi jalan, jembatan, saluran irigasi;
 - (3) Terpantaunya dan terinventarisirnya permasalahan-permasalahan pembangunan pada bidang energi, sumberdaya mineral, lingkungan hidup dan prasarana wilayah sehingga memudahkan dalam melakukan evaluasi kebijakan program pembangunan bidang energi, sumberdaya mineral, lingkungan hidup dan prasarana wilayah.
- d) Anggaran : Rp. 25.000.000,- dan Realisasi : Rp. 24.172.000,- (96,69%)
- e) Permasalahan yang Dihadapi :
- (1) Masih ditemuinya pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan;
 - (2) Kekurangan personil serta padatnya aktifitas dan kegiatan menyebabkan jadwal kegiatan monev yang telah disusun mengalami perubahan dan reschedulling sehingga hasil kegiatan perlu lebih dioptimalkan.
- f) Upaya Pemecahan Masalah :
- (1) Meningkatkan evaluasi kegiatan melalui rapat koordinasi internal yang lebih intensif dan terpadu terkait dengan kegiatan pembangunan yang sedang berjalan;
 - (2) Optimalisasi koordinasi dengan SKPD terkait guna peningkatan hasil monitoring dan evaluasi yang lebih optimal terkait kegiatan pembangunan yang sedang berjalan;
 - (3) Perlu adanya tindak lanjut atas hasil kegiatan pembangunan guna perencanaan pembangunan ke depannya.

7. Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

a) Maksud dan Tujuan

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan bidang kesejahteraan sosial, maka perlu dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan bidang kesejahteraan sosial, guna mengevaluasi program dan kegiatan eksisting dan menginisiasi kegiatan baru bilamana berdasarkan hasil evaluasi dirasakan kegiatan yang lama kurang optimal. Hal-hal yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kondisi eksisting kinerja dan permasalahan pembangunan pembangunan kesejahteraan sosial Kabupaten Purbalingga tahun 2015 yang antara lain meliputi ketepatan sasaran/objek dan lokasi kegiatan, efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya/input, serta pencapaian keluaran/output kegiatan;
- (2) Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan yang meliputi hasil/ outcome dan manfaat/ benefit kegiatan tersebut ;
- (3) Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan /program pembangunan kesejahteraan sosial.

b) Realisasi Kegiatan

- (1) Terpantaunya pelaksanaan kegiatan pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial Kabupaten Purbalingga tahun 2015 yang antara lain meliputi ketepatan sasaran (obyek) dan lokasi kegiatan, efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya (input) serta pencapaian keluaran (output) kegiatan;
- (2) Dengan terpantau dan terinventarisirnya permasalahan-permasalahan pembangunan pada Bidang Kesejahteraan Sosial akan memudahkan dalam melakukan evaluasi kebijakan dan program pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang meliputi hasil (outcome) dan manfaat (benefit).
- (3) Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial;

c) Anggaran sebesar Rp, 50.000.000,- dan realisasi Penyerapan Anggaran Rp. 40.737.500,- (81.48%)

d) Permasalahan

- (1) Masih ditemuinya berbagai permasalahan sosial di masyarakat yang belum ditangani;
- (2) Masih banyaknya PMKS yang belum terintervensi;
- (3) Masih ditemuinya kondisi sekolah masih membutuhkan ruang kelas baru, perpustakaan, dan membutuhkan rehabilitasi ruang kelas;
- (4) Masih ditemuinya sekolah yang masuk siang karena kekurangan ruang kelas;
- (5) Terdata dan terupdatenya data Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga;
- (6) Masih ditemuinya pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas yang tidak selesai;
- (7) Kualitas bangunan yang kurang memuaskan;
- (8) Masih banyaknya warga yang belum mempunyai akses sanitasi layak, belum memiliki sarana BAB ;
- (9) Kekurangan personil dan padatnya aktifitas dan kegiatan menyebabkan jadwal kegiatan monev yang telah disusun mengalami perubahan dan rescheduling sehingga hasil kegiatan perlu lebih dioptimalkan.

e) Solusi

- (1) Perlu adanya koordinasi intensif dengan SKPD terkait, khususnya mengenai data awal dan progress program dan kegiatan yang diampu ;
- (2) Perlu adanya tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi guna perencanaan pembangunan dimasa datang.

f) Hal lain yang perlu dilaporkan : -

8. Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi

a) Maksud dan Tujuan

- (1) Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembangunan Bidang Ekonomi Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 yang antara lain meliputi ketepatan sasaran (objek) dan lokasi kegiatan, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya (input), serta pencapaian keluaran (output) kegiatan;
- (2) Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan yang meliputi hasil (outcome) dan manfaat (benefit) kegiatan tersebut;
- (3) Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan / program pembangunan Bidang Ekonomi.
- (4) Menyampaikan laporan secara berkala hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan akhir.

b) Sasaran

Subyek dari Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Ekonomi adalah pelaku bidang Ekonomi di Kabupaten Purbalingga, dan semua SKPD yang berada di lingkup bidang Ekonomi, Sedangkan sasaran yang ingin dicapai antara lain:

- (1) Tersedianya 5 buku laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ekonomi.
- (2) Tercapainya peningkatan kapasitas kinerja pelaksanaan pembangunan di bidang Ekonomi di kabupaten Purbalingga.

c) Keluaran/ Out Put

- (1) Terpantaunya pelaksanaan kegiatan pembangunan Bidang Ekonomi Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 yang antara lain meliputi ketepatan sasaran (objek) dan lokasi kegiatan, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya (input), serta pencapaian keluaran (output) kegiatan;
- (2) Dengan terpantau dan terinventarisirnya permasalahan-permasalahan pembangunan pada bidang Ekonomi, akan memudahkan dalam melakukan evaluasi kebijakan dan program pembangunan bidang Ekonomi yang meliputi hasil (outcome) dan manfaat (benefit) kegiatan pembangunan.

d) Anggaran Rp. 36.700.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.27.823.300,- (76%).

e) Permasalahan Yang dihadapi

- (1) Tidak semua kegiatan pembangunan di setiap SKPD terkait bidang ekonomi termonev semuanya;
- (2) Perlu melibatkan SKPD lingkup kegiatan di bidang ekonomi sebagai anggota tim Monev

f) Upaya Pemecahan Masalah

- (1) Dibuat jadwal monitoring dan evaluasi yang lebih terarah dan terkontrol sehingga monev kelapangan dilakukan lebih maksimal lagi;
- (2) Perlu dukungan SKPD lingkup bidang Ekonomi.

g) Lain-lain yang perlu dilaporkan : -

9. WISMP

- a) Maksud dari kegiatan ini adalah Peningkatan kapasitas Sumberdaya Air Wilayah Sungai dan Irigasi serta peningkatan produktivitas pertanian di lahan beririgasi.

- b) Hasil Kegiatan adalah tersedianya tenaga ahli pendamping GP3A , IP3A dan P3A, terwujudnya komisi irigasi, Sosialisasi Perda Irigasi.
- c) Sasaran dari kegiatan ini adalah meingkatkan peran GP3A , IP3A dan P3A dalam pengelolaan sumberdaya air wilayah sungai dan lahan pertanian beririgasi.
- d) Anggaran : Rp. 175.000.000,- dan Realisasi : Rp. 147.501.950,- (84,29%).
- e) Permasalahan yang Dihadapi : -
- f) Upaya Pemecahan Masalah : -

10. Evaluasi Dampak Program Penanggulangan Kemiskinan di Purbalingga

a) Maksud dan Tujuan

Kegiatan evaluasi dampak program penanggulangan kemiskinan di kabupaten purbalingga dimaksudkan untuk mengetahui dampak program penanggulangan kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan untuk:

- (1) Mendeskripsikan profil dan pola pengeluaran masyarakat miskin;
- (2) Mengevaluasi pelaksanaan dan dampak Program Beras Miskin;
- (3) Mengevaluasi pelaksanaan dan dampak Program Jamkesmas;
- (4) Mengevaluasi pelaksanaan dan dampak Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni;
- (5) Mengevaluasi pelaksanaan dan dampak Program Keluarga Harapan (PKH);
- (6) Mengevaluasi pelaksanaan dan dampak Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS);
- (7) Mengevaluasi pelaksanaan dan dampak Program Simpan Pinjam Perempuan PNPM;
- (8) Mengevaluasi pelaksanaan dan dampak Program Bantuan Permodalan Rukun Tetangga;
- (9) Mengevaluasi pelaksanaan dan dampak program-program pembangunan infrastruktur;
- (10) Mengukur perkembangan kesejahteraan masyarakat miskin selama empat tahun terakhir dan korelasinya dengan program penanggulangan kemiskinan yang ada.

b) SASARAN

Populasi dari penelitian ini adalah rumah tangga miskin hasil Pendataan Program Layanan Sosial (PPLS) 2011, yaitu sejumlah 100.281 rumah tangga. Mereka terdiri dari keluarga sangat miskin sejumlah 44.840 rumah tangga, keluarga miskin sejumlah 28.221 rumah tangga, dan keluarga hampir miskin sejumlah 28.220 rumah tangga.

Jumlah sampel dihitung dengan menggunakan Rumus Slovin, sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah sample
N : Jumlah populasi
e : Tingkat Kesalahan

Jika dihitung berdasarkan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 0,5%, jumlah sample minimal untuk populasi sejumlah 100.281 rumah tangga adalah 398 rumah tangga. Untuk meningkatkan akurasi penelitian dan mengantisipasi jika ada responden yang tidak mau memberikan jawaban, jumlah sample kemudian dinaikkan sebesar 648 rumah tangga, atau 36 rumah tangga per desa. Sampel tersebut diambil secara acak oleh komputer melalui teknik cluster random sampling. Dengan jumlah sample yang cukup memadai dan teknik random yang dipakai, diharapkan hasil penelitian ini dapat mewakili populasi masyarakat miskin di Purbalingga.

c) KELUARAN/OUT PUT

Menyediakan data, informasi, referensi bagi penyusunan dan pengambilan kebijakan, program maupun kegiatan dalam bidang penanggulangan kemiskinan pada masa yang akan datang.

d) Anggaran Rp. 83.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 68.913.380,- (96,08%).

e) PERMASALAHAN YANG DIHADAPI : Tidak Ada.

11. Fasilitasi Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) dan Komunitas Hijau

a) Maksud dari kegiatan ini adalah menyediakan dokumen Rencana Aksi Kota Pusaka sebagai pedoman penataan kawasan yang melestarikan budaya warisan leluhur serta memfasilitasi Komunitas Hijau yang menjaga keserasian lingkungan hidup berkelanjutan

b) Hasil Kegiatan adalah Tersedianya dokumen sebagai pedoman kegiatan penataan kawasan kota pusaka serta terselenggaranya kegiatan festival kota hijau di Taman Bojong Kabupaten Purbalingga.

c) Sasaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya dokumen Rencana Aksi Kota Pusaka serta terselenggaranya Festival Kota Hijau

d) Anggaran : Rp. 83.000.000,- dan Realisasi : Rp. 77.169.000,- (92,97%)

e) Permasalahan yang Dihadapi : -

f) Upaya Pemecahan Masalah : -

12. Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Program-program Pembangunan Bidang Ekonomi di Kab Pbg (2010-2014)

a) Maksud dan Tujuan

Maksud dari pekerjaan Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Program-program Pembangunan Bidang Ekonomi di Kabupaten purbalingga (2010-2014) adalah memotret pencapaian serta mengetahui sejauh mana dampak manfaat (Outcome) yang dihasilkan dari berbagai program-program dan kegiatan pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kebelakang yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga serta hasilnya dalam tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Purbalingga.

b) Tujuan pekerjaan Evaluasi ini adalah :

- (1) Menginventarisir Program-program dan kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi di Kabupaten Purbalingga (2010-2014);
- (2) Memberikan gambaran realisasi capaian kinerja pelaksanaan program-program kegiatan pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Purbalingga yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2010-2014;
- (3) Mengetahui kemanfaatan (outcome) dari hasil pelaksanaan program-program kegiatan pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Purbalingga yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2010-2015 di masyarakat.

c) Sasaran

Subyek dari Kegiatan Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Program-program Pembangunan Bidang Ekonomi di Kabupaten purbalingga (2010-2015) ekonomi di Kabupaten Purbalingga, dan semua SKPD yang berada di lingkup bidang Ekonomi, Sedangkan sasaran yang ingin dicapai antara lain:

- (1) Terpantaunya data pembangunan di lingkup bidang ekonomi di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu tahun 2010-2015;
- (2) Dapat dijadikan masukan kepada SKPD teknis lingkup bidang Ekonomi apabila melakukan rencana program pembangunan di bidangnya;
- (3) Tercapainya peningkatan kapasitas kinerja pelaksanaan pembangunan di bidang Ekonomi di kabupaten Purbalingga.

d) Keluaran/ Out Put

- (1) Tersedianya 5 Laporan Pendahuluan Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Program-program Pembangunan Bidang Ekonomi di Kabupaten purbalingga (2010-2015);
- (2) Tersediannya 5 Laporan Antara Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Program-program Pembangunan Bidang Ekonomi di Kabupaten purbalingga (2010-2015);
- (3) Tersediannya 5 Laporan Akhir Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Program-program Pembangunan Bidang Ekonomi di Kabupaten purbalingga (2010-2015);

- e) Anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- realisasi sebesar Rp. 56.594.500,- (94,32 %)
- f) Permasalahan Yang dihadapi.
 - (1) Waktu yang terlalu sempit 3 (tiga) bulan untuk menginventarisir data kegiatan pembangunan selama 5 tahun ke belakang;
 - (2) Terbatasnya sumber data di masing-masing SKPD terkait
- g) Upaya Pemecahan Masalah
 - (1) Persiapan tim teknis dan pihak ketiga yang ditunjuk supaya lebih maksimal lagi;
 - (2) Peran data dukung SKPD terkait;

13. Pendampingan Program-program Pemberdayaan Masyarakat dan Sanitasi

a) Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Pendampingan Program-program Pemberdayaan Masyarakat dan Sanitasi adalah melakukan pendampingan program pemberdayaan masyarakat diantaranya PNPM baik Perkotaan maupun Pedesaan sedangkan untuk Sanitasi adalah untuk membuat dan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/ Kota (SSK).

Tujuan pekerjaan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/ Kota adalah :

- (1) Membuat Pemutakhiran dokumen SSK Kabupaten Purbalingga;
- (2) Penyiapan Kerangka Pengembangan Sanitasi;
- (3) Penetapan Strategi Percepatan Pembangunan;
- (4) Penyusunan Program dan Kegiatan;
- (5) Finalisasi SSK dokumen yang disahkan oleh Bupati Purbalinga.

b) Sasaran

Subyek dari Kegiatan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/ Kota Kabupaten Purbalingga adalah Tersusunnya dokumen SSK Kabupaten Purbalingga.

c) Keluaran/ Out Put

- (1) Dokumen SSK Kabupaten Purbalingga;
- (2) Kegiatan pembangunan sektor Sanitasi di Kabupaten Purbalingga yang terstruktur dan bersifat strategis selama 5 tahun kedepan;
- (3) Ikut serta mensukseskan program Universal Access di tahun 2019.

- d) Anggaran sebesar Rp. 53.000.000,- realisasi sebesar Rp. 43.400.750,- (81,89 %)

e) Permasalahan Yang dihadapi.

- (1) Terbatasnya sumber data yang dimiliki oleh SKPD/ instansi tingkat Kabupaten;
- (2) Sarana dan prasarana penyediaan data dan informasi yang belum memadai di tingkat SKPD/instansi;

f) Upaya Pemecahan Masalah.

- (1) Melibatkan seluruh SKPD terkait di dalam program Sanitasi 5 (lima) tahun kedepan;
- (2) Koordinasi dengan SKPD baik setingkat Kabupaten, Provinsi maupun tingkat Pusat.

14. Pendampingan Green Economy and Locally Appropriate Mitigation Action in Indonesia (GELAMA-I)

a) Maksud dan Tujuan :

- (1) Mengembangkan skenario-skenario tata guna lahan, rencana aksi ekonomi hijau dan konservasi biodiversitas;
- (2) Melakukan pengkajian dan pengukuran tertentu yang dibutuhkan dalam pengumpulan data dan informasi;
- (3) Mengumpulkan dan mengorganisir data yang diperlukan untuk perencanaan dan monitoring;
- (4) Melakukan analisis data (termasuk data spasial);
- (5) Menyusun konsep untuk mengintegrasikan skenario tata guna lahan terpilih kepada rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kebijakan sektor berbasis lahan;
- (6) Memfasilitasi integrasi sistem pemantauan Ekonomi Hijau dan konservasi biodiversitas ke dalam sistem monitoring pembangunan daerah;
- (7) Mengolah dan melakukan perhitungan data sebagai bagian dari pemantauan.

b) Sasaran :

Sasaran dari kegiatan Gelamai adalah para pemangku kepentingan tata guna lahan di Kabupaten Purbalingga, dan semua SKPD yang terkait dengan sektor berbasis lahan yang berpotensi untuk menimbulkan emisi maupun sekuestrasi gas rumah kaca.

c) Output/ Keluaran :

- (1) Terlaksananya upaya pengembangan ekonomi hijau dan aksi mitigasi lokal khususnya pada sektor berbasis lahan.
- (2) Terlaksananya pengkajian dan pengukuran tertentu yang dibutuhkan dalam pengumpulan data dan informasi;
- (3) Terlaksananya analisis data (termasuk data spasial);
- (4) Terwujudnya skenario-skenario tata guna lahan dan rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca;
- (5) Tersedianya baseline emisi.

d) Permasalahan yang Dihadapi :

- (1) Belum tumbuhnya kesadaran bahwa perubahan iklim menjadi tanggung jawab seluruh manusia dan diperlukan tindakan mitigasi untuk mengurangi pemanasan global;
- (2) Belum tersedianya data-data emisi dari seluruh sektor penghasil emisi Gas Rumah Kaca (dari sektor : limbah, energi, pertanian, kehutanan, penggunaan lahan) di tingkat Kabupaten Purbalingga.

e) Anggaran sebesar Rp. 73.207.000, realisasi sebesar Rp. 64.596.855,-

f) Upaya Pemecahan Masalah

- (1) Perlu kampanye tentang perubahan iklim dan aksi mitigasi yang tepat melalui workshop, FGD dan konsultasi publik;

- (2) Perlu inventarisasi sumber-sumber penghasil gas rumah kaca dari sektor limbah, energi, pertanian, kehutanan, penggunaan lahan serta penghitungan emisinya.

15. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Sosial

a) MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 yang antara lain meliputi ketepatan sasaran (objek) dan lokasi kegiatan, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya (input), serta pencapaian keluaran (output) kegiatan;
- (2) Melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan yang meliputi hasil (outcome) dan manfaat (benefit) kegiatan tersebut;
- (3) Melaksanakan evaluasi terhadap kebijakan / program pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesra.
- (4) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan akhir.

b) SASARAN

Obyek Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Kesra adalah program dan kegiatan bidang pemerintahan dan Kesra di Kabupaten Purbalingga, dan semua SKPD yang berada di lingkup bidang Pemerintahan dan kesra, Sedangkan sasaran yang ingin dicapai antara lain:

- (1) Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesra.
- (2) Tercapainya peningkatan kapasitas kinerja pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan dan Kesra di kabupaten Purbalingga.

c) KELUARAN/OUT PUT

- (1) Terpantaunya pelaksanaan kegiatan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 yang antara lain meliputi ketepatan sasaran (objek) dan lokasi kegiatan, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya (input), serta pencapaian keluaran (output) kegiatan;
- (2) Dengan terpantau dan terinventarisirnya permasalahan-permasalahan pembangunan pada bidang Pemerintahan dan Kesra, akan memudahkan dalam melakukan evaluasi kebijakan dan program pembangunan bidang Pemerintahan dan Kesra yang meliputi hasil (outcome) dan manfaat (benefit) kegiatan pembangunan.

d) PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

- (1) Tidak semua kegiatan pembangunan di setiap SKPD terkait bidang Pemerintahan dan Kesra termonev semuanya;
- (2) Perlu melibatkan SKPD lingkup kegiatan di bidang Pemerintahan dan Kesra sebagai anggota tim Monev

e) UPAYA PEMECAHAN MASALAH

- (1) Dibuat jadwal monitoring dan evaluasi yang lebih terarah dan terkontrol sehingga monev kelapangan dilakukan lebih maksimal lagi;
- (2) Perlu dukungan SKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Kesra.

16. Penyusunan RAD AMPL Kab.Purbalingga

- a) Maksud dari kegiatan ini adalah Sektor air minum dan sanitasi merupakan pelayanan public yang mempunyai kaitan erat dengan pengentasan kemiskinan. Penyediaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi akan memberi dampak pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kegiatan penyusunan RAD AMPL Kabupaten Purbalingga bertujuan menyusun Rencana Aksi Daerah dalam penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
- b) Hasil Kegiatan adalah Tersedianya dokumen Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
- c) Sasaran dari kegiatan ini adalah Tersedianya dokumen sebagai pedoman kegiatan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan sebagai pedoman Penyediaan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi
- d) Anggaran : Rp. 18.639.000,- dan Realisasi : Rp. 10.438.564,- (56,00 %)
- e) Permasalahan yang Dihadapi : -
- f) Upaya Pemecahan Masalah : -

D. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran

- a) Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga
- b) Hasil Kegiatan adalah terpenuhinya honor-honor kegiatan, uang lembur, alat tulis kantor, alat-lata listrik, perangkho dan materai, peralatan kebersihan, gas, umbul-umbul, telepon, listrik, air, surat kabar, internet, barang cetak, foto copy dan makan minum
- c) Sasarannya sebagai penunjang dalam pemenuhan prasarana yang dibutuhkan dalam memeperlancar kegiatan rutin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga
- d) Anggaran : Rp. 453.161.000,- dan Realisasi : Rp. 371.910.487,- (82,07 %)
- e) Permasalahan yang Dihadapi : -
- f) Upaya Pemecahan Masalah : -

2. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

- a) Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan rapat-rapat dan konsultasi baik yang ada di dalam daerah maupun yang ada di luar daerah

- b) Hasil kegiatan yaitu terpenuhinya rapat - rapat dan konsultasi yang ada di dalam daerah serta rapat - rapat dan konsultasi yang ada di luar daerah, sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan baik.
- c) Sasarannya yaitu semua aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga, baik yang mendakan perjalanan di dalam daerah maupun yang melaksanakan perjalan ke luar daerah
- d) Anggaran : Rp. 260.000.000,- dan Realisasi : Rp. 259.809.637,- (99,93 %)
- e) Permasalahan yang Dihadapi : kaitannya dengan efisiensi anggaran pada rapat di tingkat pusat dan provinsi, apabila yang diundang bappeda dan SKPD Teknis sering tidak menikutinya dan hanya mengambil informasi lewat SKPD teknis sehingga informasinya kurang lengkap
- f) Solusi yang ditempuh kedepan adalah dengan meningkatkan koordinasi yang lebih besar

3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

- a) Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terpeliharanya sarana dan prasarana kantor selama 1 (satu) tahun berjalan.
- b) Hasil kegiatan yaitu terlaksanya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sehingga dapat digunakan secara optimal dalam mendukung kelancaran tugas sehari-hari.
- c) Sasarannya adalah terpeliharanya sarana prasaran kantor yang perlu diperbaiki/dipelihara sehingga manfaatnya dapat lebih dioptimalkan.
- d) Anggaran : Rp. 330.722.000,- dan Realisasi : Rp. 261.094.925,- (78,95 %)
- e) Permasalahan yang dihadapi yaitu banyaknya kendaraan baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) yang sudah lama masa pakainya dan masih tingginya biaya pemeliharaan hardware dan software komputer karena terbatasnya tenaga teknis informasi (IT)
- f) Solusi yang ditempuh adalah perlu peremajaan kendaraan baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) dan penempatan tenaga teknis informasi (IT) yang memadai untuk menekan belanja pemeliharaan sarana dan prasarana

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

- a) Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor dalam mendukung perencanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat
- b) Hasil Kegiatan adalah Hasil kegiatan terlaksananya kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor sesuai dengan kebutuhan mapun spesifikasinya, sebagai berikut :

(1) Mobil	1 buah
(2) Sepeda Motor	5 buah
(3) Rak Arsip	4 buah
(4) Lemari Instrumen/Sound	1 buah
(5) Karpet	7 meter
(6) Penghancur Kertas	1 buah
(7) Mesin Absensi	1 buah
(8) Layar OHP	1 buah
(9) Penghisap Debu	1 buah
(10) AC Split	1 buah
(11) Handy Cam	1 buah
(12) Korden	49 meter
(13) Note book	3 buah
(14) Tablet	1 buah
(15) Hardisk	2 buah
(16) Printer	3 buah
(17) Soun System	1 unit
(18) Faksimile	1 buah

- c) Sasaran dari kegiatan ini adalah sarana dan prasarana kantor dalam mendukung kegiatan perencanaan pembangunan daerah
- d) Anggaran : Rp. 423.544.000,- dan Realisasi : Rp. 407.912.500,- (96,31 %)
- e) Permasalahan yang Dihadapi : -
- f) Upaya Pemecahan Masalah : -

5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

- a) Maksud dari pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur pemerintah
- b) Hasil kegiatan adalah pengiriman peserta baik seminar, diklat dan sosialisasi.
- c) Sasarannya aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditunjuk/ditugasi untuk melaksanakan diklat dimaksud
- d) Anggaran : Rp. 60.000.000,- dan Realisasi : Rp. 59.425.000,- (99,04 %)
- e) Permasalahan yang dihadapi adalah bahwa sifat dari kegiatan adalah mengirimkan peserta, sehingga taksiran biaya dan waktu pelaksanaan kadang tidak sesuai dengan perencanaan.
- f) Solusi yang ditempuh adalah kedepan dalam menyusun perencanaan mengacu pelatihan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan untuk lintas sektoral khususnya dinas tingkat Propinsi diharapkan lebih awal

memberitahukan jenis kegiatan seperti seminar, diklat dan sosialisasi serta kegiatan lain yang akan dilaksanakan dengan perincian waktu, tempat dan biaya / kontribusi yang harus disediakan.

6. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD

- a) Maksud dari kegiatan ini adalah menyediakan dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi pelaksanaan kinerja program dan kegiatan.
- b) Hasil Kegiatan adalah 1 dokumen renja SKPD, 1 dokumen LKD, 1 Dokumen LKPJ, 1 dokumen LKJ Ip.
- c) Sasaran dari kegiatan ini adalah agar program dan kegiatan Bappeda dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai tujuan organisasi.
- d) Anggaran : Rp. 18.850.000,- dan Realisasi : Rp. 15.394.000,- (81.67 %)
- e) Permasalahan yang Dihadapi : penyusunan LKPJ dan LKJ Ip tergantung pada penyelesaian dari seluruh SKPD terutama untuk menghitung rata-rata kinerja sehingga penyusunan LKPJ dan LKJ IP sering terlambat,
- f) Upaya Pemecahan Masalah : koordinasi secara terus menerus dengan seluruh SKPD.

7. Penataan Arsip

- a) Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu tertatanya arsip aktif dan inaktif keuangan.
- b) Hasil kegiatan yaitu tertatanya arsip aktif dan inaktif sebanyak 100 box.
- c) Sasarannya adalah meningkatnya kenyamanan dan keamanan lingkungan Bappeda.
- d) Anggaran : Rp. 40.000.000,- dan Realisasi : Rp. 34.453.500,- (86,13 %)
- e) Permasalahan yang dihadapi yaitu tidak ada masalah.
- f) Solusi yang ditempuh adalah tidak ada.

8. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Perencana

- a) Maksud pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud yaitu terlaksananya 2 (dua) kali pelaksanaan diklat peningkatan kapasitas dan kompetensi perencana bagi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga
- b) Hasil kegiatan adalah bertambahnya pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur perencana.
- c) Sasarannya yaitu semua aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga

- d) Anggaran : Rp. 40.000.000,- dan Realisasi : Rp. 34.453.500,- (96,31 %)
- e) Permasalahan yang dihadapi yaitu keterbatasan anggaran yang disediakan untuk diklat peningkatan kapasitas dan kompetensi perencana.
- f) Solusi yang ditempuh adalah ke depan dalam menyusun perencanaan anggaran tahun berikutnya agar menyesuaikan standarisasi dan volumenya

E. Program Penyediaan dan penyempurnaan Data dan Informasi Daerah

Program Penyediaan dan penyempurnaan Data dan Informasi Daerah terdiri dari 4 kegiatan antara lain:

1. Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan

- a) Maksud pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu terlaksananya fasilitasi ijin penelitian, desiminasi hasil litbang, keikutsertaan lomba krenova dan pameran hasil-hasil penelitian dan pengembangan di Kab. Purbalingga; Bina ilmiah remaja. Hal ini untuk melaskanakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan, dan Penerapan IPTEK.
- b) Hasil kegiatan : tersedianya Informasi kepada dinas/instansi maupun masyarakat mengenai hasil penelitian dan pengembangan dalam upaya pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan
- c) Sasaran, Kelompok sasaran Keg. : Instansi Pemerintahan, Swasta dan Masyarakat
- d) Anggaran : Rp.116.334.000,- ; Realisasi : Rp. 115.929.888,- (99,65%)
- e) Permasalahan yang dihadapi : masih rendahnya kualitas SDM dan motivasi dibidang penelitian dan pengembangan, masih rendahnya penerapan hasil ristek karena kurangnya informasi kemasyarakat tentang hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang ada.
- f) Solusi : Peningkatan kapasitas SDM litbang dengan melaksanakan bina ilmiah remaja untuk siswa dan guru pengampu ilmiah remaja; melakukan diseminasi hasil litbang dan mengikutsertakan para inventor/peneliti dalam ajang pameran sebagai upaya untuk pengembangan dan peningkatan penerapan hasil ristek ;
- g) Hal yang perlu dilaporkan : perlu dukungan lebih untuk dapat mengangkat atau memperkenalkan hasil-hasil penelitian ke masyarakat pengguna sebagai upaya peningkatan kesejahteraan.

2. Penyusunan Data Dasar dan Informasi Pembangunan Daerah

- a) Maksud pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu tersedianya Data utk Perencanaan Pembangunan & Informasi kpd Dinas/Instansi maupun

masyarakat pengguna Data. Hal ini untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.

- b) Hasil kegiatan : terlaksananya ketersediaan Buku Purbalingga Dlm Angka (PDA); Buku Saku PDA; Kecamatan Dalam Angka (KDA) Tahun 2015; Buku PDRB Kab. Purbalingga Tahun 2014, untuk SKPD dan wilayah Kecamatan; dan Buku Evaluasi Kinerja Pembangunan Bidang Sosial Ekonomi Kab. Purbalingga Tahun 2014; Buku Potensi Desa Kab. Purbalingga Tahun 2014.
- c) Sasaran, Kelompok sasaran Keg. : Instansi Pemerintahan, Swasta dan Masyarakat
- d) Anggaran : Rp.177.138.000,- ; Realisasi : Rp. 176.856.502,-(99,84%)
- e) Permasalahan yang dihadapi : Masih kurang memadainya sumber data dan kemampuan SDM pada SKPD dalam pengelolaan data dan informasi .
- f) Solusi : kerjasama atau mengikutsertakan BPS dalam upaya penyebarluasan data dan informasi tentang potensi sumberdaya dan hasil-hasil pembangunan Kabupaten Purbalingga.

3. Penyusunan Profil Daerah

- a) Maksud pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu tersedianya Data utk Perencanaan Pembangunan & Informasi kpd Dinas/Instansi maupun masyarakat pengguna Data. Hal ini juga dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
- b) Hasil kegiatan : terlaksananya ketersediaan 80 Buku SIPD kabupaten Purbalingga Tahun 2015 dan 78 Buku SIPD Kecamatan Tahun 2015
- c) Sasaran dari kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) adalah semua SKPD, semua dinas, instansi, kantor, yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Purbalingga guna :
 - (1) Meningkatnya kapasitas kinerja pelaksanaan pembangunan dan hasilnya
 - (2) Tersedianya data dan informasi daerah dengan sebaran 18 kecamatan di Kabupaten Purbalingga
 - (3) Terbangunnya manajemen pengelolaan data base profil daerah yang baik dan akurat.
- d) Anggaran : Rp.75.000.000,- (rincian : Rp. 50.000.000,- Ban Gub dan Rp. 25.000.000,- pendampingan APBD) ; Realisasi : Rp. 73.662.250,- (98.22%)
- e) Permasalahan yang dihadapi : Terbatasnya sumber data yang dimiliki oleh SKPD/ instansi tingkat Kabupaten, masih adanya inkonsistensi dan kesalahan dalam pengisian data oleh SKPD, kurangnya kesadaran akan pentingnya data, sarana dan prasarana penyediaan data dan informasi yang belum memadai di

tingkat SKPD, masih terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM dalam pengelolaan data dan informasi.

- f) Solusi : mengikutsertakan seluruh SKPD, Kecamatan dan BPS dalam keterisian data.
- g) Hal yang perlu dilaporkan : untuk meningkatkan keterisian dan kevalidan data pada format SIPD perlu dukungan anggaran untuk SKPD di wilayah guna penyediaan data statistik di wilayah.

4. Fasilitasi Tim Koordinasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu PPLS 2015

- a) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Geografis (SIG) dimaksud yaitu membangun suatu sistem informasi yang berfungsi sebagai alat bantu dalam mengolah dan menampilkan database berupa data numerik, spasial (pemetaan) dan visual yang terkait dengan kondisi dan potensi ekonomi di Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan pendampingan tim teknis yang melibatkan SKPD terkait diantaranya BAPPEDA, DINTANBUNHUT, DINPERINDAGKOP, DINAKKAN, DINHUBKOMINFO, dan Bagian Perekonomian SETDA.
- b) Hasil Kegiatan adalah berupa Paket Sistem Informasi Geografis (SIG) Potensi Ekonomi Daerah dan Peta. Data yang dimasukkan ke dalam SIG ini adalah sebagai berikut : Tema Peta Dasar, Tema Fisik Lahan, Tema Sosial Ekonomi, Tema Potensi Daerah, Tema Kebencanaan, dan Tema Perencanaan (RTRW/RDTR)
- c) Sasarannya: Tersusunya Sistem Informasi Geografis (SIG) Potensi Daerah Kabupaten Purbalingga dalam suatu aplikasi berbasis WEBGIS.
- d) Anggaran sebesar Rp.70.000.000, dan realisasinya Rp. 68.691.250 (98,13%)
- e) Perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan dimaksud melalui dan termuat dalam RPJMD 2010-2015, RKPD Tahun 2014, Renja BAPPEDA Tahun 2014 dan RKA BAPPEDA Tahun 2014.
- f) Permasalahan yang dihadapi adalah masih banyak data-data teknis terkait potensi daerah Kab. Purbalingga yang belum terupdate, sehingga diperlukan waktu dan keakuratan data yang akan disajikan dalam WEBGIS ini.
- g) Solusi yang ditempuh adalah kiranya Sistem Informasi Geografis (SIG) ini dapat dijadikan acuan untuk pengembangan potensi daerah Kabupaten Purbalingga serta perlunya personal khusus di SKPD yang bertugas mengupdate data-data yang disajikan.
- h) Kondisi sarana prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud baik, untuk sementara WEBGIS ini dipasangkan di server BAPPEDA.

- i) Hal-hal lain yang perlu dilaporkan tidak ada

2.2.1 Permasalahan dan Upaya penyelesaiannya

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Bappeda sebagai SKPD yang memiliki kewenangan di bidang perencanaan adalah :

- i. Masih terdapat opini bahwa perencanaan partisipatif hanya prosedural belaka dan hasil musrenbang desa/kecamatan tidak diakomodir dalam penganggaran.
- ii. Terjadi missinglink dalam usulan Desa sehingga usulan didominasi bidang fisik hal ini disebabkan desa tidak mengetahui prioritas masing-masing SKPD.
- iii. pemahaman tentang tujuan akhir kegiatan sebagai sarana untuk mencapai sasaran pembangunan (target kinerja) sesuai indikator yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam RPJMD belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaku kepentingan

Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA dapat dilakukan antara lain melalui:

- i. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
- ii. Perlunya upaya-upaya sosialisasi serta WORKSHOP terhadap siklus perencanaan, hasil-hasil perencanaan, penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan oleh BAPPEDA sehingga produk Bappeda akan difahami dan dapat dimanfaatkan oleh stakeholders
- iii. Peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan substansi permasalahan yang dihadapi bidang-bidang di Bappeda.
- iv. Perlunya upaya-upaya perencanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang mantap melalui rapat koordinasi yang lebih luas sehingga kegiatan kegiatan perencanaan pembangunan akan sesuai dengan kebutuhan stakeholders.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan Renja SKPD

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditugaskan dibidang perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan daerah (*think tank*), pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, advokasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan merupakan implementasi visi Pemerintah Daerah. Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga adalah

- 1. Mewujudkan kapasitas Perencanaan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel yang ditandai dengan membaiknya nilai AKIP komponen perencanaan. Adapun sasaran dari tujuan mewujudkan kapasitas Perencanaan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel adalah meningkatnya kualitas perencanaan. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan meningkatnya Rata-rata Capaian Target Kinerja Program Pembangunan Daerah.
- 2. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kelitbangan Daerah yang ditandai dengan masuknya inventor purbalingga menjadi nominator Krenova tingkat Provinsi. Adapun sasaran dari tujuan Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kelitbangan Daerah adalah Meningkatnya kualitas kelitbangan. Keberhasilan sasaran ini ditandai dengan meningkatnya persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.”.

3.2 Sasaran Renja SKPD

Sasaran dan kegiatan tahunan yang ditetapkan setiap tahun disesuaikan dengan kondisi terkini terutama untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah atau instansi/lembaga lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2017, meliputi :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan, dengan indikator kinerja Rata-rata Capaian Target Kinerja Program Pembangunan Daerah. dengan target sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KONDISI SAAT INI (2016)	Target	
				2017	2018
Meningkatnya kualitas perencanaan	Rata-rata Capaian Target Kinerja Program Pembangunan Daerah	persen	94	96,5	97

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas kelitbangan, dengan indikator kinerja : Persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah, dengan target sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KONDISI SAAT INI (2015)	Target	
				2018	2019
Meningkatnya kualitas kelitbangan	Persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	persen	-	50	50

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan kegiatan pada tahun 2017 terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.1
Indikasi Program disertai dengan Target Kinerja Tahun 2017 dan Prakiraan Maju 2018
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN KONDISI SAAT INI (2016)	TARGET KINERJA	
				2017	2018
Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti	persen ditindaklanjuti	100	100	100
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	point	Baik (79,68)	Baik (80)	Baik (80)
	Rata-rata Capaian SKP	poiin	84,76	87	88
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Aspirasi Masyarakat melalui musrenbang yang terakomodir dalam dokumen penganggaran		30	40	40
	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD		98	100	100
	Dokumen Perencanaan disusun tepat waktu	tepat waktu	100	100	100
	Dokumen Perencanaan disusun tepat prosedur	tepat prosedur	100	100	100
Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD	persen	98	100	100
	Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD	persen	100	100	100
	Tingkat Rekomendasi pengendalian dan Evaluasi Perencanaan yang ditindaklanjuti OPD	persen	-	50	50
Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	persen	-	100	100
	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan daerah	persen	-	50	100
	Jumlah kerjasama kelitbangan	kerjasama	6	6	6

Tabel IV.2
Indikasi Program dan Kegiatan Tahun 2017 disertai dengan Pagu Indikatif Tahun 2017
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017			Keterangan
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2017	
1				2	3	4	5	6
4. Unsur penunjang Urusan Pemerintaha								
	4.1 perencanaan;							
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah						
		1	Penyelenggaraan Musrenbang	Terlaksananya Pramusrenbang, Musrebangkab, Prov dan Nas	Kab. Purbalingga	4 rekomendasi	70.000.000	
		2	Penyusunan RKPD	Tersusunnya dokumen RKPD tahun 2018	Kab. Purbalingga	1 dokumen perbup (400 buku); 50 buku rancangan awal, 350 buku rancangan musrenbangkab	199.700.000	
		3	Penyusunan RKPD Perubahan	Tersusunnya dokumen RKPD tahun 2017 Perubahan		1 dokumen perbup (75 buku); 50 buku rancangan awal	119.500.000	
		4	Fasilitasi SIMRENDAs	Terinputnya data musrenbangcam	Kab. Purbalingga	18 kecamatan	69.800.000	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017			Keterangan
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2017	
1				2	3	4	5	6
				Terinputnya Renja SKPD		171 SKPD		
				Terinputnya data RKPD		34 urusan		
				Terinputnya data KUA-PPAS		34 urusan		
		5	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Ekonomi	Tersusunnya rekomendasi pembangunan bidang ekonomi	Kab. Purbalingga	12 sub sektor (pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, perdagangan, industri, koperasi dan umkm, penanaman modal, pemberdayaan, pariwisata, dan ketenagakerjaan)	49.805.000	
				Terlaksananya FGD / Workshop		3 kali		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017			Keterangan
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2017	
1				2	3	4	5	6
				Terlaksananya Deseminasi hasil evaluasi program bidang ekonomi		2 kali		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Energi, Sumberdaya Mineral, Lingkungan Hidup dan Prasarana Wilayah	Tersusunnya rekomendasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Kab. Purbalingga	6 bidang (binamarga, pengairan, ciptakarya, perhubungan, lingk hidup)	25.000.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kesra	Terlaksananya FGD Bidang pendidikan, kesehatan, KB, kependudukan dan capil, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, keamanan ketertiban, kesos	Kab. Purbalingga	9 kali	139.805.000	
				Terfasilitasinya SDG's		1 paket		
				Terfasilitasinya KLA		1 paket		
				Terfasilitasinya PPRG		1 paket		
		6	Fasilitasi Program Kota Hijau	Tersusunnya dokumen rancangan kota berkelanjutan	Kab. Purbalingga	1 dokumen (5 buku)	75.000.000	
				Terlaksannnya Keberlanjutan Aktivitas Komunitas Hijau	Kab. Purbalingga	1 Komunitas		
		7	Koordinasi dan Sinkronisasi Program	Terfasilitasinya Kegiatan Keciaptakaryaan	Kab. Purbalingga	4 program	74.695.000	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017			Keterangan
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2017	
1				2	3	4	5	6
			Keciptakarya dan Penataan Ruang					
		8	Penyusunan KUA PPAS	Tersusunnya Kesepakatan Bersama KUA PPAS	Kab. Purbalingga	4 dokumen kesepakatan (300 bk)	124.720.000	
		8	Penyusunan KUA PPAS Perubahan	Tersusunnya Kesepakatan Bersama KUA PPAS Perubahan		4 dokumen kesepakatan (300 bk)	119.850.000	
		10	Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Keciaptakarya	Tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan bidang Keciaptakarya		1 (satu) dokumen (10 buku)	74.820.000	
		11	Penyusunan RAD Pangan dan Gizi	Tersusunnya dokumen RAD PG		1 (satu) dokumen (10 buku)	50.000.000	
Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah								
		1	Pelaporan dan Rekonsiliasi Kegiatan TP, DAK dan Bangub	Tersusunnya laporan konsolidasi kegiatan TP, DAK, Bangub		4 dokumen	79.725.000	
				Pendokumentasian hasil perencanaan Pembangunan		1 dokumen		
		2	Evaluasi RKPD	Tersusunnya laporan evaluasi RKPD	Kab. Purbalingga	4 dokumen	82.055.000	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017			Keterangan
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2017	
1				2	3	4	5	6
		3	Penyusunan Evaluasi Makro Ekonomi Daerah	Tersedianya PDRB, IHK dan NTP		3 dokumen	99.660.000	
		4	Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Manusia	tersedianya buku Evaluasi IPM		1 dokumen	75.000.000	
		5	WISMP	Terbitnya Revisi SK Komisi Irigasi	Kab. Purbalingga	1 dokumen	300.000.000	
		6	Pendampingan Program WISMP	Terfasilitasinya kegiatan WISMP	Kab. Purbalingga	1 paket	128.700.000	
		7	Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Ban-Gub)	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	Kab. Purbalingga	1 dokumen (5 buku)	192.071.000	
				Bintek dan Fasilitasi Pro Poor Planning Budgeting & Monitoing				
				Bintek pemanfaatan data PBDT				
				Tersusunnya Strategi Penanggulangan Kemiskinan 2016-2020		1 dokumen (5 buku)		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017			Keterangan
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2017	
1				2	3	4	5	6
		8	Fasilitasi FEDEP (BANGUB)	Terfasilitasinya klaster UMKM	Kab. Purbalingga	4 Klaster	139.715.000	
				Pameran Produk Unggulan Daerah		2 kali		
				Workshop/FGD Potensi Unggulan Daerah		4 kali		
		9	Pendampingan Program-Program Pemberdayaan Masyarakat	Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan pemberdayaan, sanitasi, dan PNPM Perkotaan	Kab. Purbalingga	PSPS, Desa Berdikari	59.935.000	
		10	Fasilitasi Green Economy and Locally Appropriate Mitigation Action Program In Indonesia (GELAMA I)	Tersusunnya RAD Pengurangan Gas Rumah Kaca	Kab. Purbalingga	1 dokumen	130.000.000	
		11	Fasilitasi GAKY (BANGUB)	Terfasilitasinya Pelaksanaan GAKY	Kab. Purbalingga	5 kali Rakor, 5 Buku Laporan, 10 Pemeriksaan Sample Garam, 2 Kali Sosialisasi GAKY	74.790.000	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017			Keterangan
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2017	
1				2	3	4	5	6
		12	Fasilitasi PUS (BANGUB)	Terfasilitasinya Pelaksanaan dan Terpantaunya target capaian PUS	Kab. Purbalingga	5 kali Rakor, 5 Buku Laporan, 1 kali Sosialisasi, 5 Buku Laporan PUS	74.790.000	
		13	Survey Potensi Klaster Ekonomi Kerakyatan	tersedianya Dokumen Klester-Klester Ekonomi yang Menjadi Unggulan dan Andalan		1 Paket	70.000.000	
		14	Penyusunan Evaluasi Ekonomi dan Kesra	tersedianya hasil evaluasi kinerja ekonomi dan kesra		30 buku	74.910.000	
		15	Analisis Perekonomian Daerah Hasil Sensus Ekonomi 2016	Tersedianya buku potrek perekonomian daerah	Kab. Purbalingga	30 buku	74.955.000	
		Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah						
		1	Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Tersedianya daya listrik	Kab. Purbalingga	182.400 Kwh	322.808.000	
				Tersedianya Air PAM		528 M3		
				Tersedianya koneksi internet		1,2 megabyte		
				Tersedianya jasa telpon		3 sambungan		
				Tersedianya bahan kantor		1 tahun		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017			Keterangan
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2017	
1				2	3	4	5	6
		2	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya kunjungan lapangan/survey	Kab. Purbalingga	324 OH	207.195.000	
				Terlaksananya koordinasi/kunjungan/undangan tingkat regional		41 OH		
				Terlaksannnya Koordinasi/kunjungan/konsultasi/ undangan Jateng/DIY		175 OH		
				Terlaksannnya Koordinasi/kunjungan/konsultasi/ undangan Jakarta dan Kabupaten/kota diluar Jateng/DIY		59 OH		
				Terlaksananya Undangan di luar Jawa		14 OH		
		3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpeliharanya peralatan pendukung kerja	Kab. Purbalingga	30 Unit Roda dua, 6 unit roda 4, 6 mesin ketik, 25 pc, 15 laptop, 15 printer, 1 genset, 17 AC dan jaringan telpon dan internet	285.227.000	
				Terpeliharanya taman bappeda		200 m2		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017			Keterangan
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2017	
1				2	3	4	5	6
		4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tersedianya sarpras kantor	Kab. Purbalingga	75 meter Korden, 3 buah Printer, 2 Buah Printer Multifungsi, 20 Buah Kursi Rapat, 4 Buah Komputer PC, 2 Buah AC, 2 Buah Lemari Besi, 4 Buah Dispenser	102.000.000	
		5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Terkirimnya SDM dalam pelatihan teknis	Kab. Purbalingga	20 ohk	20.000.000	
		6	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Perencana	terlaksananya peningkatan kompetensi	Kab. Purbalingga	3 tema/40 personil	41.440.000	
		7	Penataan Arsip	Tertatanya arsip keuangan	Kab. Purbalingga	40 bok	20.000.000	
		8	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan Keuangan Bappelitbangda		1 dokumen tahunan dan 12 dokumen bulanan	40.000.000	
				Tersusunnya LKPJ Bappelitbangda		1 dokumen		
				Tersusunnya LKPD/EKPPD Bappelitbangda		1 dokumen		

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017			Keterangan
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2017	
1				2	3	4	5	6
				Tersusunnya Laporan Kegiatan Bulanan Bappelitbangda		12 laporan		
				Tersusunnya Laporan Realiasi keuangan Bappelitbangda		12 laporan		
				Tersusunnya LKjIP Bappelitbangda		1 dokumen		
				Tersusunnya Renstra Bappeda		1 dokumen		
				Tersusunnya Renja Bappeda		1 dokumen		
				Tersusunnya Evaluasi Renja Bappeda		1 dokumen		
4.6 penelitian dan pengembangan;								
		Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi						
		1	Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Daerah			1 pameran krenova, 6 deseminasi, 1 penghargaan lomba inovasi sekolah, 6 fasilitasi penelitian	150.000.000	
		2	Fasilitasi KKN	Terfasilitasinya pelaksanaan KKN	Kab. Purbalingga	6 PT (1750 mahasiswa)	175.000.000	

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan				Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2017			Keterangan
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif 2017	
1				2	3	4	5	6
		3	Peningkatan SDM Litbang dalam Metodologi Penelitian			1 kali peningkatan kapasitas 28 orang	25.000.000	
		4	Penguatan Sistem Inovasi Daerah			2 kali workshop	74.820.000	

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan suatu bentuk tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam menghadapi perubahan dimana dalam perencanaan dan penyusunannya memerlukan pengamatan yang tepat dan akurat, serta penilaian dan antisipasi yang efektif. Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan bukan hanya diukur dari tingkat pencapaian *output* dibandingkan dengan *input* yang digunakan, tetapi lebih dari itu diukur juga dari sejauh mana pencapaian *outcome* dan *benefit* serta dampak dari kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga sangat ditentukan oleh kapabilitas dan integritas sumber daya manusia yang berinovasi tinggi dalam mewujudkan kinerja yang lebih efektif, efisien dan optimal. Dalam mencapai kinerja tersebut harus di dukung oleh prasarana dan sarana yang cukup dan sumber daya manusia aparatur yang profesional. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 diharapkan dapat bermanfaat dalam menghadapi berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi, serta dapat memperkecil atau menghilangkan dampak-dampak negatif yang akan mengancam kesinambungan operasionalisasi dan kinerja organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan dukungan dari semua pihak yang terkait, khususnya segenap pegawai/personil yang ada di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga, karena Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga akan dapat dicapai dengan baik apabila didukung oleh semangat, dedikasi, integritas dan upaya maksimal dari seluruh personil yang ada.

Selanjutnya dokumen perencanaan ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2017 sebagai tahapan pencapaian visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam membangun Kabupaten Purbalingga untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

Kepala Bappeda Kabupaten Purbalingga



KUSMARTADHI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650315 199103 1 013